

**EXECUTIVE SUMMARY  
MODEL PEMETAAN ALOKASI PEMBIAYAAN SATUAN PENDIDIKAN  
DALAM KONTEKS DESENTRALISASI PENDIDIKAN  
DI KABUPATEN BANDUNG**

**Oleh: Dr. H. Yoyon Bahtiar Irianto, M.Pd., dkk**

**A. Permasalahan**

Pengelolaan pendidikan baik pada Jenjang, Jenis, dan Jalur pendidikan dewasa ini mengalami beberapa permasalahan, terutama kaitannya dengan pembiayaan yang harus disediakan dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Upaya menanggulangi beban pendidikan dalam konteks desentralisasi manajemen pendidikan, akan senantiasa berkaitan dengan memadai-tidaknya sistem pembiayaan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, desentralisasi mempengaruhi pola pembiayaan pendidikan. Sejak otonomi daerah dilaksanakan, terdapat tiga model penyaluran dana, yaitu dana dekonsentrasi, dana yang langsung ke kabupaten/kota, dan dana yang langsung ke sekolah. Dana dekonsentrasi diberikan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dana yang langsung ke kabupaten/kota disebut Dana Alokasi Umum (DAU), meskipun demikian ada pula DAU yang diberikan ke provinsi. DAU merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Karena kebutuhan biaya untuk setiap komponen pada setiap Jalur, Jenis dan Jenjang Pendidikan di setiap tempat/lokasi/daerah sangat berbeda. Apalagi untuk menghitung kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan yang ideal, bukan hanya dibutuhkan analisis terhadap biaya faktual semata, tetapi harus pula dikaitkan dengan laju inflasi, daya beli atau penghasilan per kapita masyarakat, serta produk domestik regional bruto. Dengan demikian, diperlukan adanya hitungan jumlah besaran Biaya Satuan (terdiri dari Investasi, Operasi, Bantuan Biaya Pendidikan dan Bea Siswa), Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan (Investasi :Lahan dan Non Lahan; dan Operasi: Personalia dan Non Personalia) dan Biaya Pribadi Peserta Didik, dalam penyelenggaraan pendidikan agar dapat dijadikan patokan untuk pemerintah dalam membuat suatu keputusan yang nantinya dapat dituangkan dalam Anggaran, khususnya

pada pos anggaran penyelenggaraan pendidikan yang berdasarkan Jalur, Jenjang dan Jenis pendidikan yang ada di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Bandung.

## **B. Fokus Kajian dan Pertanyaan Studi**

Biaya pendidikan sangat berbeda antar jenjang, jenis, dan jalur pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah dan Masyarakat (Swasta). Idealnya, perhitungan biaya satuan pendidikan tersebut harus pula berdasarkan pada kualifikasi, tingkat penghasilan orangtua, lokasi (perkotaan, semi perkotaan, dan pedesaan), wilayah topografi (pegunungan, pantai, dan dataran rendah bukan pantai), kabupaten/kota, dan provinsi, maka biaya satuan pendidikan sebetulnya perlu dihitung menurut jenjang pendidikan, jenis pendidikan, mutu sekolah, tingkat penghasilan orangtua, lokasi sekolah, kabupaten/kota, dan provinsi. Demikian pula, seyogyanya perlu pula dihitung biaya satuan pendidikan menurut jenis klasifikasi: jenis input (biaya satuan operasional dan biaya satuan modal), sifat penggunaan (biaya satuan langsung dan biaya satuan tidak langsung), jenis penggunaan (biaya satuan personel dan biaya satuan bukan personel), pihak yang menanggung (biaya satuan pribadi, biaya satuan publik, dan biaya satuan sosial), dan tempat penggunaan (orangtua/siswa, sekolah, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat).

Akan tetapi, persoalan yang paling krusial ialah perhitungan biaya pendidikan yang factual dan seharusnya/sesungguhnya mengenai besaran jumlah biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan satuan pendidikan baik pada Jalur, Jenjang dan jenis Pendidikan yang memiliki kualitas dan daya saing dengan jenis-jenis pendidikan persekolahan lainnya.

Studi ini memfokuskan analisis kebutuhan satuan biaya pendidikan baik secara faktual (yang terjadi selama ini) maupun yang seharusnya untuk setiap Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan pada setiap daerah. Berdasarkan fokus studi ini, maka persoalan-persoalan perhitungan satuan biaya pada Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan dapat dirinci ke dalam pertanyaan studi berikut:

1. Jenis-jenis kelembagaan satuan pendidikan mana yang memerlukan pembiayaan pendidikan pada tingkat Kabupaten Bandung?

2. Komponen-komponen dan aktivitas-aktivitas apa yang seharusnya dibiayai dalam penyelenggaraan satuan pendidikan di masing-masing jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar memiliki kualitas dan daya saing?
3. Berapa besar jumlah kebutuhan biaya pendidikan berdasarkan jalur, jenjang dan jenis pendidikan baik secara faktual maupun ideal berdasarkan satuan biaya dan sifat penggunaannya?

### **C. Produk Studi**

Produk yang diharapkan diperoleh dari studi ini ialah:

1. Jenis-jenis kelembagaan satuan pendidikan yang memerlukan pembiayaan pendidikan pada tingkat Kabupaten Bandung;
2. Rumusan tentang komponen-komponen dan aktivitas yang seharusnya dibiayai dalam penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing jalur, jenjang dan jenis pendidikan di Kabupaten Bandung;
3. Gambaran hitungan satuan biaya faktual dan satuan biaya yang seharusnya yang berkenaan dengan pembiayaan untuk satuan penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang perlu dibiayai di Kabupaten Bandung.

### **D. Metodologi Studi**

Sumber data dalam studi ini adalah Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan yang meliputi Pendidikan Pra Sekolah Formal dan Non Formal; Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal; Pendidikan Menengah Formal dan Non Formal; Pendidikan Jalur Khusus, yang tersebar di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Bandung. Sehingga, untuk setiap daerah diambil 4 - 5 satuan pendidikan. Untuk kepentingan analisis, biaya pendidikan dianggap sebagai satuan biaya yang terdiri dari komponen-komponen yang memicu aktivitas manajemen penyelenggaraan sekolah/pendidikan. Kemudian, dihitung besaran total biaya dan biaya rata-rata faktual maupun ideal (ideal menurut sumber data) untuk setiap aktivitas atau komponen biaya pada setiap jenjang madrasah di setiap daerah dan atau setiap wilayah.

### **E. Kesimpulan Studi**

Berdasarkan hasil pengolahan data sebagaimana dipaparkan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terapat tiga puluh lima (35) satuan program pendidikan di Kabupaten Bandung yang perlu mendapat perhatian pembiayaan dari pemerintah. Ke-35 satuan program pendidikan tersebut ialah:
  - (1) Taman kanak-kanak (TK);
  - (2) Roudhatul Athfal (RA);
  - (3) Kelompok Bermain (Kober);
  - (4) Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ);
  - (5) Posyandu terintegrasi dengan PAUD (Pos PAUD);
  - (6) Sekolah Dasar (SD);
  - (7) Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - (8) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap;
  - (9) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terbuka;
  - (10) Madrasah Ibtidaiyah (MI);
  - (11) Madrasah Tsanawiyah (MTs);
  - (12) Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA);
  - (13) Diniyah Takmiliyah Wustho (DTW);
  - (14) Sekolah Luar Biasa (SLB) A;
  - (15) Sekolah Luar Biasa (SLB) B;
  - (16) Sekolah Luar Biasa (SLB) C;
  - (17) Sekolah Luar Biasa (SLB) G;
  - (18) Sekolah Luar Biasa (SLB) Autis;
  - (19) Sekolah Luar Biasa (SLB) Inklusif;
  - (20) Pendidikan Kesetaraan Paket A setara SD;
  - (21) Pendidikan Kesetaraan Paket B setara SMP;
  - (22) Pendidikan Kesetaraan Paket C setara SMA;
  - (23) Sekolah Menengah Atas (SMA);
  - (24) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
  - (25) Madrasah Aliyah (MA);
  - (26) Diniyah Takmiliyah Ulya (DTU);
  - (27) Pendidikan Keaksaraan Fungsional;
  - (28) Pendidikan Berkelanjutan Kelompok Belajar Usaha (Kejar Usaha/KBU);
  - (29) Pendidikan Berkelanjutan Kursus-kursus;

- (30) Pendidikan Berkelanjutan Magang;
  - (31) Pemberdayaan Kewanitaan (pengarusutamaan jender, kelompok wanita usaha, kader pembangunan dan sejenisnya);
  - (32) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
  - (33) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
  - (34) Taman Bacaan Masyarakat (Perpustakaan Masyarakat);
  - (35) Pesantren-pesantren yang secara nyata melaksanakan program-program pendidikan baik secara individu maupun kelompok, yang merentang dari jenjang DTA sampai ke jenjang Kualimin.
2. Komponen-komponen yang perlu dibiayai dalam penyelenggaraan pendidikan secara umum mengacu kepada peraturan-peraturan pemerintah berkenaan standarisasi pengelolaan yang tertuang dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan PP No.48 tentang Pendanaan Pendidikan, dimana komponen-komponen tersebut terdiri dari: (1) Biaya Investasi (Investasi Lahan Pendidikan dan Investasi Non Lahan Pendidikan); (2) Biaya Operasional (Biaya Personalia dan Biaya Non Personal Tak Langsung); (3) Biaya Personal (Biaya Langsung PBM dan Biaya Tidak Langsung Terhadap PBM). **Biaya investasi** terdiri dari komponen Investasi Lahan Pendidikan dimana aktivitas yang harus dibiayai adalah Sarana dan Prasarana (Bukan Personel); Sedangkan Komponen Investasi Non Lahan Pendidikan dimana aktivitas yang harus dibiayai adalah : 1) Pengembangan SDM (Pengembangan Personel); 2) Modal Kerja Tetap (Pembinaan Siswa, Rapat Dinas Pengawas, Operasional Komite Sekolah, Biaya Peningkatan Mutu, Biaya PKL). **Biaya operasional** terdiri dari Komponen Biaya Personalia dan Biaya Non Personal Pendidikan Tak Langsung, dimana aktivitas yang dibiayainya adalah : 1) Bahan atau Peralatan Habis Pakai (ATK/Biaya ATS); 2) Daya (listrik); 3) Air; 4) Jasa Telekomunikasi (daya dan Jasa); 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Perbaikan ringan dan pemeliharaan); 6) Uang Lembur; 7) Transportasi; 8) Konsumsi; 9) Pajak; dan 10) Asuransi. **Biaya Personal** terdiri dari Komponen Biaya Langsung PBM, dimana Aktivitas yang dibiayainya adalah 1) Iuran rutin (SPP); 2) Iuran Pembangunan (DSP); 3) Iuran Daftar Ulang (siswa lama); 4) Iuran Praktikum

(laboratorium, bengkel/wokshop); 5) Iuran Perpustakaan; 6) Iuran Kegiatan Ekstra Kurikuler; 7) Iuran Karya Wisata / Studi Tour; 8) Iuran Tes/Ulangan; 9) Iuran Kas Kelas; 10) Iuran OSIS; 11) Iuran Kegiatan Olahraga (Renang); 12) Pembelian Buku Pelajaran / Bahan Ajar; 13) Pembelian LKS; 14) Pembelian Buku Tulis; 15) Pembelian Alat Tulis; 16) Foto Copy Bahan pelajaran / tugas-tugas; 17) Pembelian bahan praktik laboratorium/keterampilan/kesenian/olahraga; 18) Pembelian Pakaian Seragam Sekolah; 19) Pembelian Pakaian Olahraga; 20) Kursus/les di sekolah oleh guru; dan Biaya Tidak Langsung Terhadap PBM dengan Aktivitas yang dibiayainya meliputi: 1) Sepatu Sekolah; 2) Sepatu Olahraga; 3) Tas Sekolah; 4) Transportasi ke sekolah (Umum /Jemputan); 5) Uang saku /jajan siswa; 6) Uang makan siang (bagi yang full day); 7) Kursus / les di luar sekolah; 8) Try out di luar sekolah; 9) Rental / Pembelian Komputer.

Pemetaan komponen dan aktivitas satuan biaya yang berdasarkan jenis, jenjang dan jalur pendidikan, secara khusus dapat dilihat pada Tabel 1 lampiran ini.

3. Secara keseluruhan besaran biaya dalam penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Bandung ialah:
  - a. Kebutuhan biaya per tahun untuk jalur pendidikan Formal dibutuhkan biaya faktual sebesar Rp. 48,838,055,152,- Sedangkan biaya yang seharusnya disediakan adalah sebesar Rp. 93,662,482,977,-
  - b. Kebutuhan biaya per tahun untuk jalur pendidikan Non Formal dibutuhkan biaya faktual sebesar Rp. 2,867,659,450,- Sedangkan biaya yang seharusnya disediakan adalah sebesar Rp. 3,783,855,350,-
  - c. Kebutuhan biaya per tahun untuk jalur pendidikan Khusus dibutuhkan biaya faktual sebesar Rp. 813,188,410,- Sedangkan biaya yang seharusnya tidak ada sampel yang mengisi pada komponen ini.
  - d. Biaya yang harus dikeluarkan untuk jenjang pendidikan Pra Sekolah pada jalur formal diperlukan biaya factual sejumlah Rp. 1,123,524,950,- dan untuk Pendidikan Non Formal sebesar Rp. 445,383,700. Sedangkan Biaya yang seharusnya dikeluarkan pada jenjang ini untuk pendidikan formal

sebesar Rp. 1,711,599,000,- dan untuk Pendidikan Non Formal sebesar Rp. 571,290,900,-. Maka total biaya untuk membiayai jenjang pendidikan Pra Sekolah ini diperlukan biaya factual sebesar Rp. 1,568,908,650,- dan biaya Seharusnya yang dikeluarkan sebesar Rp. 2,282,889,900,-.

- e. Biaya yang harus dikeluarkan untuk jenjang pendidikan Dasar pada jalur formal diperlukan biaya faktual sejumlah Rp. 7,583,960,739,- dan untuk Pendidikan Non Formal sebesar Rp. 180,891,800,-. Sedangkan Biaya yang seharusnya dikeluarkan pada jenjang ini untuk pendidikan formal sebesar Rp. 10,471,019,960,- dan untuk Pendidikan Non Formal sebesar Rp. 230,695,000,-. Maka total biaya untuk membiayai jenjang pendidikan Dasar ini diperlukan biaya factual sebesar Rp. 7,764,852,539,- dan biaya Seharusnya yang dikeluarkan sebesar Rp. 10,701,714,960,-.
- f. Biaya yang harus dikeluarkan untuk jenjang pendidikan Menengah pada jalur formal diperlukan biaya faktual sejumlah Rp. 23,741,801,771,- dan untuk Pendidikan Non Formal sebesar Rp. 1,960,739,050,-. Sedangkan Biaya yang seharusnya dikeluarkan pada jenjang ini untuk pendidikan formal sebesar Rp. 35,400,713,129,- dan untuk Pendidikan Non Formal sebesar Rp. 2,692,721,850,-. Maka total biaya untuk membiayai jenjang pendidikan Menengah ini diperlukan biaya faktual sebesar Rp. 25,702,540,821,- dan biaya Seharusnya yang dikeluarkan sebesar Rp. 38,093,434,979,-.
- g. Kebutuhan biaya faktual penyelenggaraan pendidikan per satuan program pendidikan per tahun di Kabupaten Bandung pada jalur pendidikan formal dan nonformal serta pendidikan luar biasa, yaitu Rp 51.961.025.102,- (Formal dan Nonformal) + Rp 813.188.410,- (PLB) ialah **Rp 52.774.213.512,-** (*Lima puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus dua belas rupiah*), dari kebutuhan ideal sebesar Rp 97.754.536.227,- + 813.188.410 (diasumsikan), yaitu; **Rp 98.567.724.637,-** (*Sembilan puluh delapan milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah*).

- h. Kebutuhan biaya faktual penyelenggaraan pendidikan per satuan program pendidikan per tahun di Kabupaten Bandung pada jalur pendidikan formal dan nonformal yang menjadi Kewenangan Wajib Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, ialah: Rp **49.603.598.770,-** (*Empat puluh sembilan milyar enam ratus tiga jutalima ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*), dari kebutuhan ideal sebesar Rp **69.294.211.627,-** (*Enam puluh sembilan milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- i. Kebutuhan biaya faktual penyelenggaraan pendidikan keagamaan per satuan program pendidikan per tahun di Kabupaten Bandung pada jalur pendidikan formal dan nonformal yang menjadi Kewenangan Wajib Departemen Agama Kabupaten Bandung ialah Rp. **2.298.457.332,-** (*Dua milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah*), dari kebutuhan ideal sebesar Rp **28.334.788.600,-** (*Dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh deapan ribu enam ratus rupiah*).
- j. Kebutuhan biaya faktual penyelenggaraan pendidikan per satuan program pendidikan luar biasa (PLB) per tahun di Kabupaten Bandung yang menjadi Kewenangan Wajib Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung ialah Rp. **813.188.410,-** (*Delapan ratus tiga belas juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah*). Jumlah kebutuhan ini belum terhitung kebutuhan ideal, karena standarisasi komponen-komponen ideal pada jenis PLB belum ada.

## **A. RREKOMENDASI**

Dari kesimpulan di atas, dibawah ini beberapa rekomendasi yang seharusnya menjadi perhatian, yaitu:

1. Komponen-komponen dan aktivitas-aktivitas kritis yang harus menjadi perhatian dalam pembiayaan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung meliputi komponen Biaya Operasional dan Biaya Personal (Biaya Pribadi Peserta Didik). Sehingga apabila ada pola-pola bantuan dari pemerintah baik yang berupa proyek maupun bantuan lainnya mengutamakan komponen tersebut. Dengan



demikian prioritas bantuan pemerintah ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi pada komponen-komponen yang bersangkutan.

2. Untuk memperkecil disparitas dari pembiayaan yang beragam, maka perlu standarisasi dalam pembiayaan yang meliputi komponen serta aktivitas yang perlu dibiayai. Model penganggaran yang dapat dilakukan mengacu kepada standar nasional pendidikan serta kebutuhan budaya lokal yaitu mengembangkan model penganggaran yang berbasis para perencanaan dan program, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Karena itu, perlu penelusuran lebih lanjut mengenai komponen dan aktivitas biaya ideal pada setiap jenis lembaga satuan program pendidikan khususnya pada satuan-satuan program yang belum teralokasikan. Di samping itu, dalam menetapkan komponen yang harus dibiayai, perlu disesuaikan dengan kurikulum dan program-program pembelajaran sesuai dengan target yang harus dicapai pada masing-masing jenis satuan program pendidikan guna meningkatkan kualitas proses pendidikan.
3. Tidak semua komponen-komponen biaya perlu dibiayai pada setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan, tetapi setiap satuan pendidikan harus bisa menentukan komponen mana yang sifatnya sesuai standar pendidikan nasional dan mana yang sifatnya atributif. Jika komponen biaya tersebut diharuskan dalam SNP, maka sekolah wajib untuk memenuhinya, tetapi jika sifatnya atributif, sekolah dapat memenuhinya atau tidak. Hal ini disesuaikan dengan kepentingan pengembangan bagi sekolah yang bersangkutan.
4. Analisis besaran faktual dan ideal kebutuhan pembiayaan pendidikan sebagaimana hasil penelitian ini, sebetulnya masih terbatas pada kebutuhan pembiayaan pada tingkatan satuan pendidikan, sedangkan kebutuhan pembiayaan pada tingkatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum dihitung. Karena itu, untuk melengkapi pemetaan alokasi anggaran kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada tingkatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sebaiknya dihitung pula secara menyeluruh dan komprehensif, yang mencakup pembiayaan pada tingkat UPTD, Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung.

EXECUTIVE SUMMARY  
MAPPING of DEFAYAL ALLOCATION of SET OF EDUCATION  
( BUDGET MAPPING) IN SUB-PROVINCE BANDUNG

**A. Problems**

management of Good education at Jenjang, Jenis, and Jalur education these days experiences some problemses, especially its(the bearing with defrayal which must be provided in the management of education process. Effort overcomes education burden in decentralization context of management of education, would always relates to its(the memadai-tidak development defrayal system.

In its(the execution, decentralization influences education defrayal pattern. Since area autonomy is executed, there are three fund channeling models, that is deconcentration fund, fund that is direct to kabupaten/kota, and fund that is direct to school. Deconcentration fund given by central government to governor as central government proxy. Fund that is direct to kabupaten/kota called as Dana Alokasi Umum ( DAU), nevertheless there are also DAU given to provinsi. DAU is transfer having the character of public ( block grant) to overcome lameness problem horizontal ( interregional) with a purpose to main generalization of ability of interregional finance.

Because requirement of expense of every component in each Jalur, Jenis and Jenjang Pendidikan in every tempat/lokasi/daerah very differing. More than anything else to calculate requirement of expense of the management of ideal education, not merely required [by] analysis to expense of faktual as of eye, but must also be related to inflation rate, purchasing power or production per capita public, and domestic product of regional gross. Thereby, required existence of calculation number of magnitudes Biaya Satuan ( consisted of Investasi, Operasi, Help Expense Of Education and Bea Siswa), Expense Of Management and/or Pengelolaan Pendidikan ( Invesment : Farm and Non Lahan; and Operasi: Personnel and Non Personalia) and Biaya Pribadi Peserta Didik, in the management of education to can be made directive for government in making a decision that is later can be poured in Anggaran, especially at budget post the management of education which based on Jalur, Jenjang and Jenis the education in Wilayah Pemerintahan Kabupaten Bandung.

**B. Study Focus and Question of Study**

Expense of very differing in education between ladders, type, and education line managed by the Government and Masyarakat ( Private sector). Ideally, calculation expense of set of the education must also based on at qualification, level of production of parent, location ( urban, semi of urban, and rural), topography region ( mountain, coast, and lowland is not coast), kabupaten/kota, and provinsi, hence expense of set of education actually need to be calculated according to education ladder, education type, quality of school, level of production of parent, location of school, kabupaten/kota, and provinsi. And so do, properly needs also is calculated expense of set of education according to classification type: input type ( expense of set of operational and expense of set of capital), usage character ( expense of set of direct and expense of indirect identity), usage type ( expense of set of personel and expense of set of non personel), accounting party(side ( expense of set of person, expense of set of public, and expense of set of social), and place of usage ( orangtua/siswa, school, district, kabupaten/kota, provinsi, and central).

However, problem that is very krusial is calculation expense of education which factual and its(the seharusnya/sesungguhnya about magnitude number of costs needed to the management of set of good education at Jalur, Jenjang and type Pendidikan having quality and competitiveness with education types of other school.

This study focussed requirement analysis set of expense of good education in faktual (happened till now) and also which ought to every Jalur, Jenjang and Jenis Pendidikan in each area. Based on this study focus, hence problems calculation set of expense of at Jalur, Jenjang and Jenis Pendidikan can be detailed into question of study following:

1. Institution types of set of which education requires education defrayal at level Kabupaten Bandung?
2. Components and activitys what which ought to financed in the management of set of education in each line, ladder and education type to have quality and competitiveness?
3. How big requirement amounts of expense of education based on line, ladder and education type of either in faktual and also ideal based on set of expense and nature of its use?

### **C. Study Product**

Product expected obtained from this study is:

1. Institution types of set of education required education defrayal at level Kabupaten Bandung;
2. Formula about components and activity which ought to be financed in the management of education at each line, ladder and education type in Kabupaten Bandung;
3. Image of calculation set of expense of faktual and set of cost which ought to which with reference to defrayal for set of the management of education at each line, ladder and education type that need to be financed in Kabupaten Bandung.

### **D. Study Methodologies**

Data source in this study is Jalur, Jenjang and Jenis Pendidikan covering Pendidikan Pra Sekolah Formal and Non Formal; Education of Formal Base and Non Formal; Formal Middle Education and Non Formal; Education of Special Line, which spread over in Wilayah Pemerintahan Kabupaten Bandung. So, for every area is taken [by] 4 - 5 set of education. For the sake of analysis, expense of education is considered to be set of cost consisted of by components triggering management activity the management of sekolah/pendidikan. Then, calculated total cost magnitude and average-cost faktual and also ideal ( ideal according to data source) for every activity or component expense of in each ladder madrasah in every area and or every region.

### **D. Study Conclusion**

Based on result of data processing as explained at Chapter IV, hence inferential that:

1. Terapat three puluh five ( 35) set of education program in Kabupaten Bandung requiring attention of defrayal from government. Ke-35 set of the education program is:
  - ( 1) Nursery school ( TK);
  - ( 2) Roudhatul Athfal ( RADIUM);
  - ( 3) Group Of Playing ( Kober);
  - ( 4) Education Garden Al-Qur'an ( TPA/TPQ);
  - ( 5) Neighborhood health center integrated with PAUD ( Post PAUD);
  - ( 6) Elementary school ( SD);
  - ( 7) Junior high school ( SMP);
  - ( 8) Junior high school ( SMP) One Rooves;
  - ( 9) Junior high school ( SMP) Open;
  - ( 10) Madrasah Ibtidaiyah ( MI);
  - ( 11) Madrasah Tsanawiyah ( MTS);
  - ( 12) Diniyah Takmiliyah Awaliyah ( DTA);
  - ( 13) Diniyah Takmiliyah Wustho ( DTW);

- ( 14) Extraordinary School ( SLB) A;
- ( 15) Extraordinary School ( SLB) B;
- ( 16) Extraordinary School ( SLB) C;
- ( 17) Extraordinary School ( SLB) G;
- ( 18) Extraordinary School ( SLB) Autis;
- ( 19) Extraordinary School ( SLB) Inklusif;
- ( 20) Education of Equivalence of Package A equivalent SD;
- ( 21) Education of Equivalence of Package B equivalent SMP;
- ( 22) Education of Equivalence of Package C equivalent SMA;
- ( 23) Senior high school ( SMA);
- ( 24) Vocational High School ( SMK);
- ( 25) Madrasah Aliyah ( MA);
- ( 26) Diniyah Takmiliyah Ulya ( DTU);
- ( 27) Education of Functional Keaksaraan;
- ( 28) Education Is Having Continuation Group Of Business Learning ( Pursues Usaha/KBU);
- ( 29) Education Is Having Continuation Courses;
- ( 30) Education Is Having Continuation Apprentices;
- ( 31) Femininity Enableness ( pengarusutamaan jender, group of business woman, development cadre and his(its conspecific);
- ( 32) Public Learning Centre Of Activities ( PKBM);
- ( 33) Learning Activity Gallery ( SKB);
- ( 34) Public Library ( Public Library);
- ( 35) Pesantren-pesantren which manifestly executes education programs of either individually and also group, what spans from ladder DTA up to ladder Muallimin.

2. Components that need to be financed in the management of education in general refers to governmental regulations hit standardization of management written in PP No. 19 the year 2005 about Education National Standard and PP No48 about Pendanaan Pendidikan, where the components is consisted: ( 1) Expense Of Invesment ( Invesment Area Of Education and Investasi Non Lahan Pendidikan; ( 2) Operating expenses ( Expense Of Personnel and Biaya Non Personal Tak Langsung); ( 3) Personnel expense ( Direct Cost PBM and Indirect Expenses To PBM). Expense of invesment consisted of component Investasi Lahan Pendidikan where activity which must be financed is Facilities and basic facilities ( Non Personel); While Invesment Component Non Area Of Education where activity which must be financed is : 1) SDM Expansion ( Expansion Personel); 2) Permanent Working Capital ( Construction of Student, Supervisor Office Meeting, School committee Operational, Expense Of Improvement of Quality, Expense Of PKL). Operating expenses consisted of Komponen Biaya Personalia and Biaya Non Personal Pendidikan Tak Langsung, where activity financed by it is : 1) Material or Peralatan Habis Pakai ( ATK/BIAYA ATS); 2) Energy?power ( electrics); 3) Water; 4) Telecommunications Service ( energy?power and Jasa); 5) Facilities and basic facilities Keeping ( Light repair and keeping); 6) Part time payment; 7) Transportation; 8) Consumption; 9) Tax; and 10) Insurance.

Personnel expense consisted of Komponen Biaya Langsung PBM, where Aktivitas financed by it is 1) Routine fee ( SPP); 2) Development Fee ( DSP); 3) re- List Fee ( stripper student); 4) Fee Praktikum ( laboratory, bengkel/wokshop); 5) Library Fee; 6) Extra curricular Activity Fee; 7) Masterpiece Fee Wisata / Study Tour; 8) Fee Tes/Ulangan; 9) Class Cash Fee; 10) Fee OSIS; 11) Athletics Activity Fee ( Renang);12) Purchasing of Schoolbook / Teaching Material; 13) Purchasing LKS; 14) Writing book Purchasing; 15) Stationery Purchasing; 16) Photograph Copy Of lesson material / duties; 17) Purchasing of material practice of laboratorium/keterampilan/kesenian/ athletics; 18) Purchasing of School Uniforms; 19) Sportswear Purchasing; 20) Kursus/les in school by teacher; and Indirect Expenses To PBM with Aktivitas financed by it is covering: 1) School Shoe; 2) Athletics Shoe; 3) Schoolbag; 4) Transportation to school ( Public /Jemputan); 5) Pocket money /jajan

student; 6) Lunch money ( for which full day); 7) Courses / extramural les; 8) Try extramural out; 9) Rental / Purchasing computer.

Mapping of component and activity set of cost which based on type, ladder and education line, peculiarly visible at Tabel 1 this enclosure.

3. As a whole magnitude expense of in the management of set of education in Kabupaten Bandung is:
  - a. Requirement of expense of per year for education line of Formal is required expense of faktual Rp. 48,838,055,152,- While cost which ought to be provided is Rp. 93,662,482,977,
  - b. Requirement of expense of per year for education line of Non Formal is required expense of faktual Rp. 2,867,659,450, While cost which ought to be provided is Rp. 3,783,855,350,
  - c. Requirement of expense of per year for education line of Khusus is required expense of faktual Rp. 813,188,410,- While cost which shouldn't there are sample filling at this component.
  - d. Cost which must be released for education ladder of Pra Sekolah at formal line is costed money [by] faktual a number of Rp. 1,123,524,950,- and Pendidikan Non Formal Rp. 445,383,700. While Cost which ought to be released at this ladder for formal education Rp. 1,711,599,000,- and Pendidikan Non Formal Rp. 571,290,900,- . Hence total cost to finance education ladder of this Pra Sekolah costed money faktual Rp. 1,568,908,650,- and expense of Seharusnya released Rp. 2,282,889,900
  - e. Cost which must be released for education ladder of Dasar at formal line is costed money [by] faktual a number of Rp. 7,583,960,739,- and Pendidikan Non Formal Rp. 180,891,800 , While Cost which ought to be released at this ladder for formal education Rp. 10,471,019,960,- and Pendidikan Non Formal Rp. 230,695,000,-. Hence total cost to finance education ladder of this Dasar costed money faktual Rp. 7,764,852,539,- and expense of Seharusnya released Rp. 10,701,714,960
  - f. Cost which must be released for education ladder of Menengah at formal line is costed money [by] faktual a number of Rp. 23,741,801,771,- and Pendidikan Non Formal Rp. 1,960,739,050,- While Cost which ought to be released at this ladder for formal education Rp. 35,400,713,129,- and Pendidikan Non Formal Rp. 2,692,721,850,-. Hence total cost to finance education ladder of this Menengah costed money faktual Rp. 25,702,540,821,- and expense of Seharusnya released Rp. 38,093,434,979.
  - g. Requirement of expense of faktual the management of education per set of education program per year in Kabupaten Bandung at formal education line and nonformal and extraordinary education, that is Rp 51.961.025.102,- ( Formal and Nonformal) + Rp 813.188.410,- ( PLB) is Rp. 52.774.213.512,- ( Fifty two billion seven hundred seventy four millions two hundreds thirteen thousand five hundreds twelve rupiahs), from ideal requirement equal to Rp 97.754.536.227,- 813.188.410 ( assumed), that is; Rp 98.567.724.637,- ( Ninety eight billion five hundreds six puluh seven million seven hundred twenty four thousands six hundred three puluh seven rupiahs).
  - h. Requirement of expense of faktual the management of education per set of education program per year in Kabupaten Bandung at formal education line and nonformal becoming Kewenangan Wajib Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, is: Rp 49.603.598.770,- ( Fourty nine billion six hundred three jutalima hundred Ninety eight thousand seven hundred seventy rupiahs), from ideal requirement equal to Rp 69.294.211.627,- ( Six puluh nine billion two hundreds Ninety four millions two hundreds eleven thousand six hundred twenty seven rupiahs).

- i. Requirement of expense of faktual the management of religious education per set of education program per year in Kabupaten Bandung at formal education line and nonformal becoming Kewenangan Wajib Departemen Agama Kabupaten Bandung is Rp. 2.298.457.332,- ( Two billion two hundreds Ninety eight million four hundreds fifty seven thousand three hundred three puluh two rupiahs), from ideal requirement equal to Rp Rp 28.334.788.600,- ( Twenty eight billion three hundred three puluh four million seven hundred eighty deapan thousand six hundred rupiahs).
- j. Requirement of expense of faktual the management of education per set of extraordinary education program ( PLB) per year in Kabupaten Bandung becoming Kewenangan Wajib Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat in Kabupaten Bandung is Rp. 813.188.410,- ( Eight hundred thirteen million one hundred eighty eight thousand four hundreds ten rupiahs). Number of this requirement has not counted ideal requirement, because standardization of ideal components at type PLB has not is exist.

## **E. Recommendation**

From above conclusion, under this some recommendations which ought to become attention, that is:

1. Components and stall activitys which must become attention in education defrayal in the Government area of Sub-Province Bandung covers Operating Expenses component and Personnel expense ( Expense Of Educative Participant Person). So if there is help patterns from government including other project and also help majors the component. Thereby governmental help priority addressed to accomplishment of requirement of defrayal which cannot be fulfilled at the components.
2. To minimize disparity from immeasurable defrayal, hence needing standardization in defrayal covering component and activity that need to be financed. Budgeting model which can be done refers to education national standard and requirement of local culture that is developing budgeting model being based on the plannings and program, either on a long term and also short-range. In consequence, needs further scanning about ideal component and cost activity in each institute type set of education program especially at set of programs which has not been allocation. Despitefully, in specifying component which must be financed, need to be adapted for curriculum and study programs as according to target which must be reached at each type astuan education program to increase quality of education process.
3. Not all components expense of need to financed in each type, ladder and education line, but every set of education should be able to determine which component in character according to national education standard and which in character attributive. If the cost component obliged in SNP, hence mandatory school to fulfill his(its, but if in character attributive, school can fulfill it or no. This thing adapted for expansion importance for the school.
4. Magnitude analysis faktual and ideal of requirement of defrayal of education as result of this research, actually still limited to requirement of defrayal at level set of education, while requirement of defrayal at level Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD) and Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) has not been calculated. In consequence, to complement mapping of allocation of requirement budget of defrayal of the management of education at Local Government level of Sub-Province Bandung is better if calculated also accross the board and comprehensive, what include;covers defrayal at level UPTD, Dinas Pendidikan, Development Planning Body of Area ( Bappeda) and Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung.